

HASIL TURNITIN - JSIME_Ferdy+3.

by Pustaka Publisher

Submission date: 03-Apr-2025 11:43AM (UTC-0500)

Submission ID: 2634096035

File name: JSIME_Ferdy_3.docx (55.11K)

Word count: 2233

Character count: 15644



Analisis Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Keberlanjutan Pembangunan Wilayah di Desa Manunggal

Ferdy Alamsyah

Universitas Negeri Medan

Nur Indah Lestari

Universitas Negeri Medan

Leli Sartika

Universitas Negeri Medan

Alan Mustaqim Nst

Universitas Negeri Medan

Sahala Fransiskus Marbun

Universitas Negeri Medan

Alamat Kampus: Universitas Negeri Medan

Korespondensi penulis: ferdyalam.3233131029@mhs.unimed.ac.id

No. WA Aktif Agar mudah dihubungi:

Abstract. Sustainable regional development is a challenge for local governments in managing resources optimally. Regional autonomy grants local governments the authority to formulate policies that align with the needs and potential of their regions. This study aims to analyze the implementation of regional autonomy policies on sustainable development in Manunggal Village, Deli Serdang Regency. The research employs a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation and policy document analysis. The findings indicate that regional autonomy policies have contributed to improving infrastructure, public services, and local economic development. However, challenges such as budget constraints and limited land availability may hinder sustainable development. Therefore, periodic evaluations and support from various stakeholders are necessary to ensure that the implemented policies effectively enhance the well-being of the community in a balanced manner.

Keywords: Infrastructure, Public Policy, Sustainable Development, Regional Autonomy

Abstrak. Pembagunan wilayah yang berkelanjutan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara optimal. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah setempat untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

Received Desember 30, 2022; Revised April 30, 2023; Accepted Agustus 30, 2023

*Corresponding author, ferdyalam.3233131029@mhs.unimed.ac.id

implementasi kebijakan otonomi daerah terhadap keberlanjutan pembangunan di Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan otonomi daerah telah berkontribusi dalam peningkatan infrastruktur, layanan publik, serta pengembangan ekonomi lokal. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan lahan yang dapat menghambat keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkala serta dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Kata kunci: Infrastruktur, Kebijakan Publik, Pembangunan Daerah, Otonomi Daerah

LATAR BELAKANG

Keberlanjutan Keberlanjutan pembangunan wilayah di Indonesia sangat mendesak untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dengan laju urbanisasi yang tinggi, ketimpangan antarwilayah masih menjadi tantangan besar, terutama dalam akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan pembangunan di wilayahnya. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kesempatan untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah, sehingga pembangunan dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti sendiri dan nomos yang berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of Social Science, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah the legal self sufficiency of social body and its actual independence. Jadi ada 2 ciri hakikat dari otonomi yakni legal self sufficiency dan actual independence. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti self government atau the condition of living under one's own laws.

Kebijakan dibutuhkan untuk mengoptimalkan pencapaian keadilan dan kesejahteraan sosial bagi warga negara. Kebijakan otonomi daerah sesungguhnya merupakan instrumen kebijakan yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa setiap warga negara bisa mendapatkan akses terhadap pelayanan sosial dasar, seperti layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, perlindungan sosial, dan berbagai tunjangan sosial lainnya.

² Koesoemahatmadja sebagaimana dikutip I Nyoman S berpendapat bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (regeling), juga mengandung arti pemerintahan (bestuur). Namun demikian, walaupun otonomi ini sebagai self government, self sufficiency dan actual independence, keotonomian tersebut tetap berada pada batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat yang menyerahkan urusan kepada daerah.

³ Tujuan dari rencana otonomi daerah pada hakikatnya adalah untuk mempercepat pembangunan daerah, baik dalam bidang kesejahteraan maupun ekonomi. Demikian juga untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah yang ada, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi serta respon pelayanan. ⁴ Potensi kebutuhan dan karakteristik masing masing daerah.

Untuk menjamin suksesnya pelaksanaan otonomi daerah diperlukan komitmen yang kuat dari kepemimpinan yang konsisten dari pemerintah pusat. Dari pemerintah daerah juga di harapkan lahirnya pemimpin-pemimpin pemerintahan yang demokratis, DPRD yang mampu menjembatani antara tuntutan rakyat dengan kemampuan pemerintah, organisasi masyarakat yang mampu memobilisasi dukungan terhadap kebijakan yang menguntungkan masyarakat luas, kebijakan ekonomi yang berpihak pada pembukaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha, serta berbagai pendekatan sosial budaya yang secara terus menerus menyuburkan keharmonisan dan solidaritas antar warga.

Namun dalam pelaksanaan kebijakan otonomi tersebut terdapat tantangan yang dapat menghambat diantaranya adalah tanpa perencanaan yang matang, otonomi daerah juga berisiko memperparah ketimpangan antarwilayah jika daerah yang memiliki sumber daya lebih unggul berkembang pesat, sementara daerah dengan keterbatasan tetap tertinggal. Perbedaan kapasitas dan komitmen dari setiap pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan juga dapat menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antarwilayah, baik dari segi infrastruktur, ekonomi, maupun kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pembangunan wilayah Desa Manunggal apakah sudah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh otonomi daerah setempat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi

kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas masyarakat secara optimal.

14 **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis kebijakan otonomi daerah terhadap keberlanjutan pembangunan wilayah di Desa Manunggal. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan dan memahami fenomena yang terjadi secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Sumatera Utara, yang merupakan salah satu daerah yang menerapkan kebijakan otonomi daerah dalam pembangunan wilayahnya.

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan langsung melakukan observasi lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, seperti peraturan daerah, laporan tahunan desa, serta referensi dari buku dan jurnal ilmiah yang relevan.

11
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menginterpretasikan temuan penelitian berdasarkan hasil lapangan dengan kebijakan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan riset yang dilakukan, terdapat kebijakan yang mengatur tentang bagaimana penataan di Desa Manunggal akan dilakukan. Kebijakan ini tertuang pada peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang nomor 1 tahun 2021 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Deli Serdang 2021-2024, beberapa kebijakan tersebut adalah a) Pemeliharaan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; b) Pengembangan pusat-pusat pelayanan wilayah secara merata sesuai dengan daya dukung dan potensinya; c) Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas dan merata guna meningkatkan perekonomian wilayah; d) Peningkatan luas dan produksi sektor-sektor unggulan yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional; e) Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, seimbang dan berkelanjutan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat; dan f) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Lalu berdasarkan observasi yang dilakukan di Desa Manunggal ditemukan beberapa fasilitas sarana prasarana atau bangunan yang sudah berdiri disana, berikut fasilitas yang ditemukan masjid, gereja, sekolah rumah sakit, jembatan, gerbang tol, lapangan serbaguna, pusat perbelanjaan modern, pasar, tempat pengisian bahan bakar kendaraan, kantor desa, taman desa, pos keamanan, balai desa.

Berdasarkan observasi yang kami lakukan juga bahwa fasilitas dan sarana prasarana serta bangunan di atas berada dalam kondisi yang tergolong masih baik walau ada beberapa yang sudah kelihatan tua. Dalam perosesnya kami juga menemukan kendala dalam pembangunan wilayah di Desa Manunggal termasuk dari aspek anggaran yang terbatas dan lahan yang semakin sempit akibat pertumbuhan penduduk.

Dari hasil penelitian, kebijakan otonomi daerah di Desa Manunggal telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan wilayah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2021-2024, yang mengatur berbagai aspek pembangunan, termasuk pemeliharaan lingkungan, pengembangan pusat pelayanan, serta peningkatan infrastruktur dan perekonomian wilayah. Implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari berbagai fasilitas yang telah dibangun di desa ini, yang masing-masing memiliki keterkaitan dengan kebijakan tata ruang yang berlaku.

Jika perda tersebut dikaitkan dengan hasil pengamatan bangunan dan infrastruktur yang terdapat di Desa Manunggal, maka dapat di kategorikan sebagai berikut:

1. **Pemeliharaan dan Pelestarian Fungsi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Kebijakan ini bertujuan untuk menyediakan ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tujuan kenyamanan masyarakat. Keberadaan ruang hijau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dari urbanisasi serta memberikan ruang rekreasi bagi masyarakat. Beberapa bangunan atau infrastruktur yang cocok dengan peraturan daerah tersebut adalah Taman Desa yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau untuk

mengurangi polusi, serta menjadi tempat masyarakat untuk bersantai dan beraktivitas di lingkungan yang sehat.

2. Pengembangan Pusat Pelayanan Wilayah secara Merata Sesuai dengan Daya Dukung dan Potensinya

Kebijakan ini memastikan bahwa fasilitas pelayanan publik tersedia di seluruh wilayah sehingga masyarakat tidak perlu pergi ke daerah lain untuk mendapatkan layanan dasar. Penyediaan pusat pelayanan yang merata akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempermudah akses terhadap layanan publik. Beberapa bangunan atau infrastruktur yang cocok dengan Perda tersebut adalah Kantor Desa, yang berperan sebagai pusat layanan administratif bagi masyarakat, Sekolah, yang memastikan akses pendidikan yang merata bagi penduduk desa, serta Rumah Sakit, yang menyediakan layanan kesehatan bagi warga desa sehingga mereka tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan perawatan medis.

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas dan Merata Guna Meningkatkan Perekonomian Wilayah

Kebijakan ini bertujuan untuk membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperlancar kegiatan perdagangan lokal. Infrastruktur yang memadai akan menciptakan akses yang lebih baik bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Beberapa bangunan atau infrastruktur yang cocok dengan Perda tersebut adalah Pasar, yang menjadi tempat utama bagi masyarakat untuk melakukan perdagangan lokal, Pusat Perbelanjaan Modern, yang meningkatkan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat, serta Tempat Pengisian Bahan Bakar Kendaraan, yang berperan penting dalam mendukung transportasi dan distribusi barang di Desa Manunggal.

4. Peningkatan Luas dan Produksi Sektor-Sektor Unggulan yang Produktif, Efisien, dan Mampu Bersaing Dalam Perekonomian Nasional

Kebijakan ini mendukung pengembangan sektor unggulan yang dapat meningkatkan daya saing daerah dalam skala nasional. Infrastruktur transportasi yang memadai akan mempercepat distribusi barang serta meningkatkan efisiensi perekonomian desa. Beberapa bangunan atau

infrastruktur yang cocok dengan Perda tersebut adalah Gerbang Tol, yang mempermudah akses ke daerah lain serta mempercepat distribusi barang, dan Jembatan, yang memudahkan mobilitas masyarakat serta menghubungkan desa dengan wilayah sekitar untuk meningkatkan aktivitas ekonomi.

5. Peningkatan Fungsi Kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan di lingkungan desa agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan rasa aman. Keamanan desa yang baik akan menciptakan kondisi sosial yang lebih kondusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa bangunan atau infrastruktur yang cocok dengan Perda tersebut adalah Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling), yang berperan sebagai pusat pengamanan dan koordinasi dalam menjaga ketertiban desa.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan otonomi daerah yang diterapkan di Desa Manunggal telah berkontribusi terhadap keberlanjutan pembangunan wilayah. Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang 2021-2024 dapat terlihat dari berbagai aspek pembangunan di desa ini. Pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan diwujudkan melalui keberadaan Taman Desa, yang berperan sebagai ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Pengembangan pusat pelayanan wilayah yang merata didukung dengan keberadaan Kantor Desa, Sekolah, dan Rumah Sakit, yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Pembangunan infrastruktur ekonomi juga berjalan dengan baik melalui penyediaan Pasar, Pusat Perbelanjaan Modern, dan Tempat Pengisian Bahan Bakar Kendaraan, yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, kebijakan peningkatan luas dan produksi sektor unggulan telah didukung oleh Gerbang Tol dan Jembatan, yang mempercepat akses transportasi serta distribusi barang dan jasa. Di sisi lain, untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, telah tersedia fasilitas seperti Kantor Polisi atau Pos Keamanan Desa (Poskamling) yang berfungsi menjaga stabilitas dan kenyamanan lingkungan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan otonomi daerah yang diterapkan di Desa Manunggal telah berkontribusi terhadap keberlanjutan pembangunan wilayah. Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang 2021-2024 dapat terlihat dari berbagai aspek pembangunan di desa ini.

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah di Desa Manunggal telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan wilayah, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi kebijakan ini terlihat dari berbagai fasilitas publik yang tersedia, seperti sekolah, rumah sakit, pasar, dan infrastruktur transportasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan, seperti keterbatasan anggaran dan lahan, yang dapat menghambat keberlanjutan pembangunan desa. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi berkala agar kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Suparto, S. (2017). Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya.
- Thahir, B. (2019). Kebijakan sosial dan otonomi daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2(2), 91-102.
- Sabrina, R. (2022). Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Era Otonomi Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 22(1), 53-61.
- Hannan, A., & Rahmawati, F. (2020). Strategi Pembangunan Pariwisata Daerah Berkelanjutan Melalui Konsep Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia , respon dan perhatian pemerintah terhadap agenda 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan kebijakan yang lebih terfo. *Entita*, 2(1), 97-119.
- Henry. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 2(Desember 2014), 118.

- Makhmudi, D. P., & Muktiali, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan Pada Program Plpbk Di Kelurahan Tambakrejo, Kota Semarang. *Jurnal Pengembangan Kota*, 6(2), 108. <https://doi.org/10.14710/jpk.6.2.108-117>
- Renoati, R. (2003). Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Era Otonomi Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *In Mimbar Hukum* (Vol. 3, Issue 43, pp. 101–115). <http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=2808>
- Fahri, Marratu. "Faktor Pendukung Kebehasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1 (2022): 22–31.
- Arya Fernandes. "Pencapaian Dan Tantangan Otonomi Daerah: Faktor Kepemimpinan, Kelembagaan, Dan Stabilitas Politik Lokal." *CSIS Indonesia* 1, no. 1 (2022).
- Ahmad Robi. "Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi Dalam Pemerintah Daerah Berdasarkan Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Sosio Akademika* 13, no. 1 (2023): 54–68.

HASIL TURNITIN - JSIME_Ferdy+3.

ORIGINALITY REPORT

31 %

SIMILARITY INDEX

27 %

INTERNET SOURCES

17 %

PUBLICATIONS

18 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	peraturan.bpk.go.id Internet Source	8%
2	123dok.com Internet Source	5%
3	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	4%
4	pdfcoffee.com Internet Source	3%
5	jurnal.umsu.ac.id Internet Source	2%
6	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part III Student Paper	2%
7	Annisa Rohim. "Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lokal", PATTIMURA Legal Journal, 2024 Publication	1%
8	Novelia Vionita Lumaya, Feliks Arfid Guampe, Fredrik Bastian Kawani, Olvit Olniwati Kayupa. "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepemimpinan Pemerintah Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat", Jurnal Manajemen dan Budaya, 2024 Publication	1%

9	ejurnal.iainpare.ac.id Internet Source	1 %
10	Ringgo Saprianto, Tiur Roida Simbolon, Alexandra Hukom. "Implikasi Otonomi Daerah Pada Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia", JEPP : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata, 2023 Publication	1 %
11	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas PGRI Semarang Student Paper	1 %
13	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1 %
14	ejournal.penerbitjurnal.com Internet Source	1 %
15	www.scribd.com Internet Source	1 %
16	I Nyoman Ruja, Neni Wahyuningtyas, Khofifatu Rohmah Adi, Moh. Pebrianto et al. "Sinergi Stakeholder dalam Mengembangkan Desa Wisata Berkelanjutan: Pemetaan dan Peran di Desa Samar Tulungagung", Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan, 2024 Publication	1 %
17	docplayer.info Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On